



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IWAN ROSYADI
2. Jabatan : KEPALA BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA
3. NHK : 155435

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.710.000.000**

1. Tanah Seluas 1084 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, WARISAN Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 80 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 157 m2/63 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/57 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 113.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA SOUL GT SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, SUZUKI SWIFT GX Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 109.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 13.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 52.068.027**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 3.888.068.027**

III. HUTANG **Rp. 242.810.002**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 3.645.258.025**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.